

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DESA WISATA DI DESA
JAMBU KECAMATAN KAYEN KIDUL KABUPATEN KEDIRI**

Novi Ekri Nurwahyuni

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Universitas Negeri Surabaya

Novi.17040674039@mhs.unesa.ac.id

Muhammad Farid Ma'ruf

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Universitas Negeri Surabaya

muhammadfarid@unesa.ac.id

Abstrak

Pemberdayaan Masyarakat diwadahi dengan mengembangkan spot-spot wisata yang ada didalam Desa Wisata Jambu. Tujuan dari pemberdayaan melalui pengembangan Desa Wisata adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kemampuan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, serta metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian ini mengacu pada teori pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebianto yakni memuat 4 indikator, antara lain Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan. Pada Bina Manusia diwujudkan dalam melibatkan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata serta mengadakan pelatihan pada berbagai bidang. Bina Usaha masyarakat memanfaatkan spot wisata dijadikan sebagai wadah dalam promosi usaha mereka. Bina Lingkungan diwujudkan dalam pemeliharaan lingkungan dengan melakukan gotong-royong mengubah DAS menjadi spot wisata. Pada Bina Kelembagaan hubungan antar lembaga seperti Pemerintah Desa, BUMDES, Pokdarwis, RT, RW, dan PKK saling bersinergi dalam rangka mengembangkan Desa Wisata. Saran penelitian ini yaitu Pemerintah lebih memerhatikan masyarakat yang kurang responsive, serta membuat Sistem Pengelolaan Keuangan berbasis aplikasi sehingga keuangan BUMDES bersifat transparan dan akuntabel.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan, Desa Wisata

Abstract

Community empowerment is accommodated by developing tourist spots in the Jambu Tourism Village. The purpose of empowerment through the development of a Tourism Village is to improve the economy and community capacity. This research uses a qualitative approach with descriptive types, and data collection methods by interview, observation, and documentation. The focus of this research refers to the community empowerment theory put forward by Mardikanto and Soebianto, which contains 4 indicators, including Human Development, Business Development, Community Development, and Institutional Development. Human Development is manifested in involving the community in the development of a Tourism Village and holding training in various fields. Community Business Development utilizes tourist spots as a forum for promoting their businesses. Community Development is manifested in preserving the environment by working together to transform watersheds into tourist spots. In Institutional Development, relations between institutions such as the Village Government, BUMDES, Pokdarwis, RT, RW and PKK work together in order to develop a Tourism Village. The suggestion of this research is that the Government pays more attention to the less responsive community, and makes an application-based Financial Management System so that BUMDES finances are transparent and accountable.

Keywords: Community Empowerment, Development, Tourism Village

PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil Pendataan Potensi Desa atau Podes yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2018, tercatat terdapat 83.931 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 75.436 desa, 8.444 kelurahan, dan 51 UPT/SPT. Pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dalam survey tersebut didapatkan melalui beberapa penilaian kategori yaitu wilayah yang disurvei harus memiliki batas wilayah yang jelas, terdapat masyarakat yang menetap, ada pemerintah desa/kelurahan (BPS, 2018)

Pemusatan pembangunan ekonomi di daerah perkotaan menjadikan daerah pedesaan mengalami ketertinggalan pembangunan, sehingga berdampak terhadap laju ekonomi masyarakatnya. Dengan adanya permasalahan ketimpangan pembangunan ekonomi maka diperlukan solusi untuk mengatasi, salah satunya adalah dengan menggalakkan program pembangunan nasional. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata (Nurhuda, 2013). Pendekatan pembangunan nasional dewasa ini berkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional membutuhkan peran serta masyarakat yang ikut mendukung dalam mewujudkan tujuan program pembangunan nasional.

Pemberdayaan masyarakat menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai. Sementara itu, definisi pemberdayaan manusia menurut Adisasmita 2013 (dalam (Karimah, 2014)) menyatakan bahwa Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat perdesaan secara lebih efektif dan efisien, baik dari (a) aspek masukan atau input (sumberdaya manusia, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi; (b) dari aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan); (c) dari aspek keluaran atau output (pencapaian sasaran, efektivitas, dan efisiensi).

Arti penting adanya pemberdayaan masyarakat desa yang dikemukakan oleh (Endah, 2020) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk mendayagunakan dan memampukan potensi yang dimiliki masyarakat desa memberikan nilai positif bagi kesejahteraan dan taraf hidup sosial ekonomi masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat desa tidak akan berhasil tanpa adanya sumber pendanaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah memberikan alokasi anggaran dana untuk pemerintah desa yang bersumber dari APBN yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

NO	NAMA DAERAH	JUNJUR DESA	ALOKASI DANA PER DESA	ALOKASI DAERAH	ALOKASI APBN/DA	ALOKASI KEMERDEKAAN	ALOKASI FORMULA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Kab. Sidenreng	87	662.806	87.064.123	-	1.446.906	20.266.938	94.492.017
4	Kab. Sidenreng	86	662.806	87.064.123	-	1.204.864	47.462.098	108.940.271
1	Kab. Bangkalis	273	662.806	180.946.058	3.950.948	3.896.092	142.057.488	330.890.065
2	Kab. Bangkalis	189	662.806	128.270.284	-	2.727.834	84.928.937	214.947.095
3	Kab. Bangkalis	220	662.806	156.817.200	-	3.176.112	62.488.966	121.476.286
4	Kab. Bangkalis	419	662.806	277.717.714	1.371.438	6.331.592	82.882.506	347.201.310
5	Kab. Bangkalis	209	662.806	138.236.464	1.089.808	3.028.016	68.823.266	238.476.071
6	Kab. Gresik	330	662.806	218.736.360	1.516.340	4.762.168	63.954.816	287.931.801
7	Kab. Gresik	236	662.806	149.794.156	726.536	3.214.208	181.277.428	380.112.329
8	Kab. Gresik	205	662.806	200.894.612	1.453.076	4.326.880	83.266.768	285.180.124
9	Kab. Gresik	343	662.806	227.264.428	726.856	4.899.264	89.914.387	322.882.645
10	Kab. Lamongan	162	662.806	202.110.732	1.080.200	3.997.036	23.244.124	217.177.662
11	Kab. Lamongan	158	662.806	131.225.388	1.453.072	3.281.920	59.696.838	195.387.514
12	Kab. Lamongan	238	662.806	131.225.388	-	3.281.920	26.474.847	162.891.085
13	Kab. Magelang	207	662.806	137.360.543	-	3.026.016	31.110.866	171.377.661
14	Kab. Magelang	378	662.806	220.240.668	-	5.475.648	127.466.360	384.981.576
15	Kab. Magelang	298	662.806	198.178.984	-	4.332.880	26.646.141	281.148.395
16	Kab. Magelang	264	662.806	174.560.784	-	3.746.436	109.108.972	287.836.283
17	Kab. Mojokerto	213	662.806	141.277.678	363.268	3.026.016	59.696.408	197.264.936
18	Kab. Pasuruan	165	662.806	110.029.796	908.170	3.449.632	37.973.132	150.658.730
19	Kab. Pasuruan	178	662.806	117.979.468	2.179.608	3.898.728	81.180.411	204.928.219
20	Kab. Pasuruan	161	662.806	206.014.846	4.172.544	4.899.264	121.611.191	349.747.652
21	Kab. Ponorogo	281	662.806	286.284.486	1.453.072	4.024.688	65.618.738	327.356.030
22	Kab. Ponorogo	308	662.806	218.411.900	1.624.700	4.762.168	210.205.843	432.797.687
23	Kab. Ponorogo	180	662.806	119.268.260	2.542.876	3.293.728	108.748.977	238.137.641
24	Kab. Ponorogo	222	662.806	212.463.320	-	4.411.072	78.138.264	296.146.960
25	Kab. Ponorogo	132	662.806	87.490.290	363.268	1.974.248	49.943.817	139.249.235
26	Kab. Ponorogo	200	662.806	218.728.260	18.881.112	4.735.168	109.424.120	341.286.410
27	Kab. Ponorogo	162	662.806	100.764.612	-	3.181.440	63.974.866	158.482.638
28	Kab. Ponorogo	311	662.806	206.124.666	181.434	4.466.976	83.662.720	340.448.264
29	Kab. Ponorogo	227	662.806	170.841.162	363.268	3.746.196	63.212.060	227.644.946
30	Kota Batu	19	662.806	12.959.314	-	388.192	18.911.949	29.133.055

Gambar 1. Rincian Penerimaan Alokasi Dana Desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan

Berdasarkan data Rincian penerimaan alokasi dana desa Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 diatas disebutkan bahwa Kabupaten Kediri mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.322.882.645. Pada Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018 dinyatakan bahwa prioritas penggunaan dana desa di Kabupaten Kediri untuk bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Keberhasilan dalam pengelolaan dana desa dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat akan menciptakan desa yang mandiri. Menurut (Nursetiawan, 2018) bahwa Desa mandiri merupakan desa yang mampu memenuhi kebutuhannya dan apabila terdapat bantuan dari Pemerintah, bantuan tersebut hanya bersifat stimulus. Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai desa mandiri tersebut diantaranya dengan melakukan implementasi inovasi di setiap sendi lembaga usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Salah satu desa yang memiliki keberhasilan dalam mengelola BUMDES dengan baik adalah Desa Jambu.

Desa Jambu merupakan salah satu desa di Kabupaten Kediri yang memiliki inovasi dan kreasi dalam membangun desa melalui desa wisata. Desa ini masuk dalam wilayah administrasi kecamatan Kayen Kidul yang berjarak kurang lebih delapan kilometer dari pusat Kabupaten Kediri. Pertanian merupakan potensi terbesar yang dimiliki, sehingga kondisi perekonomian masyarakat yang mayoritas sebagai petani tergolong rendah. Menurut (Tukiman, Ertien, 2019) menyatakan bahwa memisahkan mata rantai kemiskinan dianggap dapat membebaskan dari ketidakberdayaan dan membebaskan dari kemiskinan, menumbuhkan kekuatan dan memiliki kemandirian. Pembangunan desa dari segi lingkungan dan

infrastruktur yang kurang sehingga desa ini dapat dikategorikan sebagai desa terbelakang meskipun alokasi dana desa telah diberikan namun belum dapat mengelola dengan maksimal.

Sejak tahun 2014, dengan kepemimpinan desa oleh Agus Joko Susilo perbaikan desa mulai dilakukan dibangunnya desa wisata edukasi yang dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pemerdayaan masyarakat. Menurut (Azis & Meirinawati, 2020) bahwa pengembangan potensi Desa Wisata Jambu ini merupakan langkah strategis untuk membangun dan meningkatkan perekonomian lokal khususnya pedesaan. Tujuan pengelolaan desa wisata menurut Priasukmana (dalam (Edwin, 2015) adalah :

- a) Mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pembangunan pariwisata dengan menyediakan obyek wisata yang alternative
- b) Menggali potensi desa untuk pembangunan masyarakat sekitar.
- c) Memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha bagi penduduk desa, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan demikian akan terjadi pemerataan pembangunan ekonomi desa.
- d) Mendorong masyarakat kota yang relatif memiliki tingkat perekonomian yang mapan agar dapat berkunjung ke desa untuk berwisata (ruralisasi).
- e) Menumbuhkan rasa bangga bagi masyarakat desa untuk tetap tinggal didesanya serta mengurangi tingkat urbanisasi.
- f) Mempercepat pembauran antara orang-orang non pribumi dengan orang pribumi.
- g) Memperkokoh persatuan bangsa sehingga bisa mengatasi disintegrasi.

Berdasarkan (Imron, 2020) menyatakan bahwa bagi desa yang telah berhasil berinovasi dengan segala potensi yang di miliki tentu bakal menerima panin dikemudian hari. Pemberdayaan masyarakat diwadahi dalam mengelola spot-spot wisata yang ada seperti Kebun Bibit Kediri, Wisata Edukasi Wiwit Padi, Permainan Outbond, Wisata Tubing Niagara, Wisata Edukasi Menangkap Lele, Agrowisata Petik Kelengkeng, Agrowisata Petik Alpukat, Agrowisata Buah Lokal, Wisata Edukasi Menanam Padi, Agrowisata Okulasi dan Tabulampat, Wisata Edukasi Angon Kerbau, Edukasi Pengolahan Yogurt, Edukasi Perah Kambing Ettawa, Edukasi Pengolahan Limbah Kayu "Ask Craft", Wisata Sungai Sejuta Ikan, Edukasi Karawitan, Pasar Papringan. Pemerintah desa memberikan dorongan kepada masyarakat untuk meningkatkan peran serta dalam pengembangan desa wisata. Selain itu, pemerintah desa juga memberikan wadah atau fasilitas bagi masyarakat untuk membuka usaha dalam upaya

meningkatkan pendapatan mereka yaitu melalui penjualan di area spot wisata. BUMDES berperan dalam menjembatani usaha masyarakat untuk dipromosikan pada spot-spot wisata. Selain itu, BUMDES juga memiliki otoritas dalam mengelola keuangan hasil pendapatan wisata yang selanjutnya akan dijadikan sebagai modal dalam pengembangan desa wisata

Kehadiran inovasi pembangunan desa wisata juga menambah nilai positif yaitu membuka lapangan pekerjaan sehingga mampu menekan angka pengangguran di desa Jambu. Dukungan dari masyarakat menjadi modal akan keberhasilan adanya program desa wisata untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta mewujudkan desa Jambu yang kreatif inovatif. Peneliti mengangkat isu ini dikarenakan program desa wisata Jambu memiliki keberhasilan dalam membangun pemberdayaan masyarakat sehingga mewujudkan perubahan kehidupan masyarakat desa baik dilihat dari segi ekonomi, social, maupun lingkungan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa melalui pengelolaan desa wisata Jambu dengan judul artikel "**Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri**"

METODE

Penelitian dilakukan di Desa Jambu, Kecamatan Kayen kidul, Kabupaten Kediri. Peneliti memilih lokasi ini karena adanya inovasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Jambu dalam meningkatkan potensi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa dengan membangun desa wisata jambu. Peneliti meneliti pemberdayaan masyarakat pada rentan waktu tahun 2020, penelitian hanya berfokus pada beberapa spot wisata dikarenakan terjadi wabah Pandemi COVID-19 sehingga hanya beberapa spot wisata yang dibuka yakni diantaranya Kebun Bibit Kediri, Pasar Papringan, Wisata Edukasi Kambing Ettawa, Agrowisata Petik Kelengkeng, Agrowisata Petik Alpukat, Tabulampot, Sejuta Ikan, Wisata Edukasi Tanam Padi.

Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Peneliti menggunakan pengambilan sample dengan teknik purposive sampling yaitu pengambilan subjek bukan didasarkan pada strata, random ataupun daerah namun didasarkan atas tujuan penelitian. Dalam penelitian ini mengambil subyek penelitian yaitu Kepala Desa Jambu, Kepala pengelola BUMDes, Kepala pengelola desa wisata jambu, masyarakat desa jambu.

Fokus penelitian pada penelitian ini mengacu pada teori pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebiato (2019:114) dalam (Indriyanto, 2020) yang meliputi empat indicator yaitu Bina Manusia,

Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan. Penggunaan teori tersebut dikarenakan sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat dalam artikel, teori tersebut memuat yaitu :

- a. Bina Manusia
Fokus penelitian yang mengacu pada indikator bina manusia antara lain mengenai keikutsertaan masyarakat dalam mengelola desa wisata jambu untuk pengembangan kapasitas individu pada masyarakat Desa Jambu.
- b. Bina Usaha
Pengelolaan desa wisata jambu dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa Jambu menjadi fokus penelitian ini, dimanasalah satu prospek keberhasilan pemberdayaan masyarakat desa Jambu adalah untuk meningkatkan usaha perekonomian masyarakat.
- c. Bina Lingkungan
Prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) menjadikan perencanaan pembangunan yang harus memerhatikan kondisi kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.
- d. Bina Kelembagaan
Lembaga memiliki peran dalam keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata. Lembaga meliputi Pemerintah desa Jambu, Pokdarwis, BUMDES, PKK.

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Primer
Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pemerintah desa yaitu Kepala Desa Jambu beserta perangkat-perangkatnya, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan masyarakat Desa Jambu yang ikut serta dalam mengelola Desa Wisata Jambu.
- b. Sekunder
Data sekunder didalam penelitian ini didapatkan dari dokumen-dokumen pemerintah Desa Jambu yang memiliki keterkaitan dengan pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori dari Miles dan Huberman dalam (Gunawan, 2016) menyatakan bahwa analisis data terdiri atas 4 indikator Data Collection (Pengumpulan Data), Data Reduction (Reduksi data atau Pengolahan Data), Data Display (Penyajian Data), Conclusion Drawing and Verifying (Pemaparan dan penarikan kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Wisata Jambu merupakan desa wisata edukasi yang didirikan pada tahun 2014 dengan menjunjung tinggi

kearifan lokal masyarakat yang mencakup perikanan, pertanian, perkebunan, kerajinan, dan budaya. Berdasarkan hasil penggalan data berupa wawancara bersama Bapak Agus Joko Susilo selaku Kepala Desa Jambu yakni :

“Dengan melihat kondisi geografis Desa Jambu yang tidak memiliki sumber daya alam yang kuat seperti gunung, laut, dan situs bersejarah maka kita meng-eksplere potensi sesuai dengan kearifan lokal yang ada di Desa Jambu salah satunya adalah agama, budaya, dan tradisi. Sehingga yang kita unggulkan adalah wisata edukasi dengan menjunjung tinggi kearifan lokal yang ada.”

Kearifan lokal adalah perilaku positif manusia dalam berinteraksi dengan alam dan lingkungan lokalnya yang bersumber dari nilai adat istiadat religius, nasehat nenek moyang atau budaya lokal, yang secara alamiah dibangun dalam suatu masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan lokalnya. Seperti yang dijelaskan oleh (Vitasurya, 2016) menyatakan bahwa penerapan perilaku pada kehidupan masyarakat diwariskan dan dikembangkan menjadi nilai-nilai yang dianut secara kaku disebut budaya.

Dalam pengembangan Desa Wisata Jambu kelompok masyarakat yang diberdaya antara lain petani, peternak, ibu-ibu, dan juga lansia. Masing-masing kelompok ini diberdaya melalui pengembangan spot wisata yang berbeda.

Tabel 1. Matrik Spot Wisata dan Kelompok yang Diberdaya

SPOT WISATA	PETANI	PETERNAK	IBU-IBU	LANSIA
KEBUN BIBIT				
PAPRINGAN				
SEJUTA IKAN				
PERAH KAMBING ETTAWA				
TANAM PADI				
TABULAMPOT				
AGROWISATA KELENGKENG				
AGROWISATA ALPUKAT				

Sumber : Data Penulis

Terdapat perubahan yang terjadi pada pemberdayaan masyarakat di Desa Jambu setelah adanya inovasi pengembangan Desa Wisata. Dimana sebelum adanya Desa Wisata masyarakat mayoritas berprofesi sebagai petani sehingga penghasilan hanya mengandalkan dari hasil panen. Namun, setelah adanya Desa Wisata para petani diberdayakan dengan mengembangkan agrowisata sehingga dapat menambah penghasilan. Perubahan juga dirasakan oleh kelompok masyarakat ibu-ibu yang

berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga, dimana kegiatan sehari-hari hanya mengurus keluarga namun dengan adanya Desa Wisata dapat dijadikan wadah bagi ibu-ibu untuk berjualan sehingga dapat menambah penghasilan. Peternak kambing juga merasakan perubahan dimana sebelum ada Desa Wisata mereka hanya sekedar beternak namun dengan adanya Desa Wisata peternak diberdayakan melalui pengembangan Spot Wisata Perah Kambing Ettawa. Kelompok lansia diberdayakan melalui pengelolaan spot wisata, dimana sebelum ada Desa Wisata lansia tidak mampu bekerja sehingga tidak memiliki kegiatan dan penghasilan namun dengan adanya Desa Wisata mereka diberdayakan dalam mengembangkan spot wisata Tanam Padi yang berperan sebagai pelayan wisata.

Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata sudah baik, namun masih terdapat permasalahan yang perlu diperbaiki guna untuk mencapai tujuan dari pembangunan desa wisata. Hasil penelitian didapatkan dari focus penelitian berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebiato (2019:114) dalam (Indriyanto, 2020) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat terdiri atas Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, Bina Kelembagaan. Hasil penelitian akan dijelaskan berdasarkan dengan indicator focus penelitian, sebagai berikut:

a. Bina Manusia

Pelaksanaan bina manusia pada awal pengembangan desa wisata dilakukan melalui forum-forum musyawarah masyarakat desa seperti Musyawarah Desa (Musdes), Musyawarah Dusun (Musdus), pengajian rutin, dan PKK. Pemerintah Desa menyadari bahwa pemberdayaan tidak akan berjalan apabila tidak ada partisipasi masyarakat didalamnya. Dalam hal ini sebagaimana dinyatakan oleh (Shonah, 2013) bahwa pada konsep pemberdayaan membutuhkan dukungan partisipasi masyarakat yang aktif untuk mengentaskan diri mereka sendiri dari permasalahan yang sedang menghadangnya.

Forum-forum tersebut sebagai wadah sosialisasi oleh pihak pemerintah desa jambu yang bersinergi dengan Pokdarwis dalam rangka untuk membuka mindset atau pemikiran masyarakat dalam mendukung pembangunan desa wisata. Namun, banyak masyarakat yang menolak akan rencana pembangunan desa wisata. Mereka ragu dan menganggap remeh akan keberhasilan pengembangan desa wisata dikarenakan mengingat desa Jambu terletak pada dataran rendah sehingga tidak memiliki keunggulan potensi alam yang dapat diandalkan.



Gambar 2. Pelaksanaan Musyawarah Desa (MusDes) Menjadi Wadah Untuk Sosialisasi Kepada Masyarakat

Sumber : Dokumentasi Pemerintah Desa Jambu

Pada tahap selanjutnya, bina manusia dilaksanakan dengan lebih memberikan pembuktian kepada masyarakat mengenai keberhasilan pengembangan desa wisata, salah satunya dengan mengajak menanam bibit pohon kelengkeng disetiap rumah. Bibit diberikan secara gratis dengan tujuan untuk menarik minat masyarakat dalam menanam, meskipun demikian masih terdapat masyarakat yang kurang mendukung upaya tersebut. Sebagaimana dipaparkan oleh Bapak Agus Joko Susilo selaku Kepala Desa Jambu bahwa :

“Dahulu masyarakat diberikan bibit kelengkeng oleh desa diterima hanya sebagai formalitas saja, namun tidak di tanam hanya dibiarkan di halaman rumah. Karena masyarakat jika hanya diberikan sosialisasi dan edukasi saja tidak akan cukup, namun juga perlu melakukan pembuktian, pendampingan, dan pengawasan. Pengawasan dan pendampingan saya lakukan setiap hari keliling desa untuk mengambil dokumentasi tumbuhan kelengkeng warga hal ini menjadikan pemikiran warga akan terbuka. Sehingga sekarang jika diberikan bibit maka sangat semangat untuk menanam karena masyarakat sudah mengetahui hasil yang didapatkan secara finansialnya.”

Wawancara tersebut diperkuat dengan observasi yang dilakukan peneliti bahwa banyak pohon kelengkeng yang tumbuh di sekitar rumah masyarakat. Sebagaimana pohon sudah berbuah dan dipetik sehingga dapat dijual kepada wisatawan. Pemerintah desa memberikan wadah bagi masyarakat untuk menjual hasil kelengkeng di spot wisata sehingga hasil penjualan dapat dirasakan dengan bertambahnya penghasilan. Dengan adanya pembuktian tersebut sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat yang semula tidak mendukung untuk ikut serta mengembangkan agrowisata petik kelengkeng.



Gambar 3 . Hasil Panen Pada Agrowisata Petik Kelengkeng

Sumber : Dokumentasi Peneliti

Pada pengelolaan wisata juga melibatkan masyarakat yang sudah berusia non-produktif seperti masyarakat usia lanjut untuk diajak ikut serta dalam mengelola spot wisata. Mereka bergabung dalam pengembangan Wisata Edukasi Tanam Padi yang berperan sebagai pelaku wisata dalam memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai cara menanam padi serta filosofi menanam padi. Hal ini akan memberikan dampak pada peningkatan ekonomi masyarakat usia lanjut, sebagaimana dipaparkan oleh Bapak Agus Joko Susilo, yaitu :

“Kita memberdayakan para masyarakat yang berusia non-produktif dimana sudah tidak mampu bekerja untuk kita libatkan dalam spot wisata edukais Tanam Padi sebgai guide atau pemandu menanam. Disamping itu mereka juga memberikan wawasan pengetahuan kepada anak pelajar mengenai filosofi menanam padi. Sehingga juga memberikan keuntungan bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan sebesar Rp.30.000,-“

Hal tersebut diperkuat dengan observasi peneliti dilapangan bahwa terdapat sawah milik desa atau lebih dikenal dengan “sawah bengkok” yang dijadikan sebagai lahan untuk Wisata Edukasi Tanam Padi.



Gambar 4. Wisata Edukasi Tanam Padi “Tandur”

Sumber : Dokumentasi Pemerintah Desa Jambu

Pemerintah desa juga mengadakan pelatihan pada berbagai bidang baik pertanian, perkebunan, pariwisata, dan informasi dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas individu masyarakat desa sehingga mampu terciptanya masyarakat yang independen, berwawasan luas, serta kreatif inovatif sebagaimana dinyatakan oleh (Rindayani, 2013) bahwa pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan,

kesadaran, dan kemampuan masyarakat serta meningkatkan ketrampilan dalam mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Pelatihan pada bidang pertanian dan perkebunan dilaksanakan dengan mengundang narasumber dari instansi terkait yaitu Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri untuk memberikan pelatihan terkait pada teknik okulasi, teknik stek, serta pengembangan agrowisata. Hal ini diperkuat dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola pertanian sehingga mereka dijasikan guide saat acara kunjungan pelatihan Okulasi dari Aceh.



Gambar 5. Pelaksanaan Pelatihan

Sumber : Dokumentasi Pemerintah Desa Jambu

Pada bidang informasi, penyuluhan dilakukan dengan mendatangkan narasumber dari instansi terkait yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Penyuluhan dilakukan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terkait pemasaran penjualan produk wisata dengan berbasis online di e-commerce. Penyuluhan ini dilakukan mengingat kemampuan Sumber Daya Manusia serta angka melek teknologi di desa Jambu yang rendah sehingga menghambat perkembangan pemasaran produk. Masyarakat diberikan pelatihan terkait cara memasarkan di perdagangan elektronik pada media social diantaranya yaitu mengenai memuat cara membuat kemasan produk yang menarik, cara dokumentasi penunjang pemasaran, serta cara membuat akun promosi di media social maupun e-commerce.

KULINER DESA JAMBU DAN SEKITARNYA



Gambar 6. Produk Usaha Masyarakat

Sumber : Dokumentasi Peneliti

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) bersama pemerintah desa Jambu membangun karakter masyarakat

desa dengan memberikan sosialisasi terkait pentingnya penerapan sikap dan perilaku sebagai pelayan wisata. Menurut (Kanom et al., 2020) menyatakan bahwa masyarakat diberikan pengetahuan mengenai “*Sapta Pesona*” atau Tujuh Unsur wisata yang meliputi aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Penerapan *Sapta Pesona* merupakan salah satu langkah awal dalam menciptakan suasana destinasi pariwisata yang ramah lingkungan guna mewujudkan destinasi pariwisata berkelanjutan.

Bentuk sikap dan perilaku yang diterapkan diantaranya adalah cara berkomunikasi dengan wisatawan harus menggunakan kalimat komunikatif dan informative sehingga akan memberikan rasa nyaman pada wisatawan. Penerapan *sapta pesona* tersebut diharapkan mampu merubah karakter masyarakat desa Jambu sehingga akan mendukung terciptanya masyarakat desa yang memiliki kualitas individu yang baik, sebagaimana dipaparkan oleh Bapak Agung selaku Ketua Pokdarwis bahwa :

“*Karena kita memiliki desa wisata yang menjadi tujuan wisatawan maka masyarakat kami beri wawasan mengenai Sapta Pesona. Mereka kami himbau dan kami edukasi agar menerapkannya. Menerapkan melalui hal-hal kecil seperti menjaga kelestarian, keindahan lingkungan sehingga hal ini membuat wisatawan merasa nyaman dan aman saat berwisata. Sekaligus menerapkan 6S yaitu (senyum, sapa, salam, sopan, santun, salim). Juga menerapkan hal-hal kecil seperti apabila ada orang bertanya maka menjawab tidak boleh menggunakan jari telunjuk, melainkan dengan telapak tangan yang menengadahkan. Hal-hal seperti ini kita tanamkan karena kami sebagai tuan rumah wisata yang seharusnya melayani wisatawan.*”

Hal tersebut diperkuat dengan kajian observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa masyarakat bersikap ramah terhadap wisatawan yang hadir, seperti halnya yang dirasakan oleh peneliti saat melakukan kajian lapangan masyarakat menerima dengan sikap ramah dan sopan.

Pemerintah desa juga melakukan upaya dalam merubah karakter remaja desa yang terkenal akan kurang terdidik dikarenakan remaja desa yang putus sekolah dan tidak memiliki pekerjaan. Mereka diberikan sosialisasi dan pendekatan agar tertarik untuk ikut serta berperan dalam pengembangan desa wisata. Remaja desa direkrut oleh BUMDES untuk bekerja pada pengelolaan spot-spot wisata seperti Kebun Bibit Kediri, dan Wisata Air Tebing Niagara. Dengan upaya tersebut selain merubah karakter dan perilaku remaja untuk menjadi lebih baik juga mampu menekan angka pengangguran di desa Jambu

Pada upaya Bina Manusia yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Jambu maupun Kelompok Sadar

Wisata (Pokdarwis) dalam rangka mendorong pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta bergabung mengembangkan desa wisata sudah baik, namun masih juga terdapat permasalahan yang terjadi. Masih terdapat masyarakat yang hanya sekedar mengikuti pelatihan namun tidak mengimplementasikan pada usaha mereka, sehingga pelatihan yang dilaksanakan terkesan tidak memiliki hasil yang jelas seperti yang dipaparkan oleh Bapak Agus bahwa

“*Dalam pelatihan masih terdapat masyarakat yang bersikap acuh-tak acuh pada pelatihan, mereka hanya datang, duduk, dan diam tidak memerhatikan.*”

b. Bina Usaha

Pembangunan Desa Wisata Jambu dilakukan dengan betujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa memprioritaskan perekonomian masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup. Masyarakat dilibatkan dalam pengembangan desa wisata, hal tersebut ditujukan untuk menjadi wadah bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka seperti usaha diantaranya keripik pisang, rengginang, yogurt, dan kerajinan manik-manik dari limbah kayu.. Spot-spot wisata menjadi jembatan bagi masyarakat sebagai wadah mempromosikan usaha mereka kepada wisatawan yang berkunjung. Seperti spot wisata Tabulampot menjadi wadah bagi masyarakat untuk menjual hasil panen perkebunan mereka seperti kelengkeng dan alpukat. Harga buah yang dipatok dalam Tabulampot tergolong lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar, hal ini sebagai strategi untuk menarik minat wisatawan. Dengan mekanisme seperti ini akan memudahkan masyarakat dalam memasarkan hasil panen mereka.

Peran BUMDES dalam bina usaha yaitu sebagai perantara atau kepanjangan tangan dari masyarakat untuk mempromosikan produk usaha mereka. BUMDES membantu melakukan promosi produk usaha masyarakat untuk dijual di spot wisata. Seperti pada spot Wisata Edukasi Perah Kambing Ettawa, masyarakat yang memiliki kambing diajak bergabung untuk mengembangkan wisata edukasi dengan menjadikan usaha peternakan kambing sebagai destinasi wisatawan. Sebagaimana dijelaskan oleh ibu Sulis selaku pemilik usaha Perah Kambing Ettawa, yakni :

“*Awalnya saya hanya memiliki peternakan kambing kecil-kecilan saja, tapi dengan ikut bergabung dalam spot Wisata Edukasi Perah Kambing Ettawa seiring berjalannya waktu menjadi berkembang. Dengan bergabung dalam spot wisata edukasi ini merasakan ada peningkatan penghasilan yang semula hanya sebagai usaha peternakan kambing biasa. Tarif masuk Wisata Edukasi Kambing Ettawa sebesar*

Rp.5.000, disitu terdapat bagi hasil antara pihak BUMDES dan pemilik kambing, bagi hasilnya yaitu sebesar Rp.2.000, untuk BUMDES dan sisanya sebesar Rp.3.000, untuk pemilik (masyarakat). Hasil dari kotoran kambing juga dapat dimanfaatkan untuk dijual sebagai pupuk kompos organik sehingga bisa menjadi tambahan penghasilan lagi.”

Hasil wawancara tersebut diperkuat oleh data observasi yang diperoleh peneliti bahwa kondisi peternakan Kambing Ettawa berkembang maju dengan nama “Ettawa Kusuma Yudha”



Gambar 7. Wisata Edukasi Perah Kambing Ettawa “Etawa Kusuma Yudha”

Sumber : Dokumentasi Pemerintah Desa Jambu

Pada spot wisata Pasar Papringan menjadi wadah bagi perkumpulan ibu-ibu PKK untuk turut serta bergabung dalam mengembangkan wisata. Pasar Papringan menyuguhkan konsep pasar “Tempoe Doeloe” baik mengenai konsep pakaian penjual yang mengenakan batik lurik, konsep kemasan makanan yang menggunakan dedaunan, serta suasana pasar di hutan bambu dengan hiburan gamelan. Pemerintah Desa menyediakan beberapa lapak yang dapat digunakan masyarakat untuk berjualan. Penjual di Pasar Papringan terdiri dari perkumpulan ibu-ibu PKK yang menjual berbagai makanan, minuman atau produk usaha unggulan masing-masing RT. Masing-masing RT mendapatkan bagian satu lapak untuk berjualan, yang terdiri atas 4 sampai 5 penjual. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, dengan adanya Pasar Papringan sebagai wadah bagi ibu-ibu PKK untuk berjualan memberikan dampak bagi peningkatan pendapatan dimana ibu-ibu PKK yang semula hanya sebagai ibu rumah tangga namun dengan adanya wadah tersebut dapat meningkatkan kreativitas. Sebagaimana dituturkan oleh Ibu Yuli selaku penjual di Pasar Papringan sekaligus Ketua PKK RT 04 RW 12 Dusun Jambu yang menjelaskan bahwa :

“Dalam berjualan di Pasar Papringan kami merasakan dampak pada peningkatan penghasilan. Dimana biasanya ibu-ibu hanya bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga mengurus keluarga namun dengan adanya wadah ini akhirnya kami bisa mendapatkan penghasilan tambahan.”

Dalam upaya mendukung bina usaha masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, namun masih terdapat kendala atau permasalahan didalamnya seperti kurangnya fasilitas lahan dalam berjualan. Meningkatnya minat ibu-ibu PKK untuk berjualan di Pasar Papringan namun hal ini tidak didukung oleh ketersediaan tempat yang ada, selain itu juga kurangnya perhatian masyarakat dalam menaati peraturan yang diberlakukan di spot wisata sehingga menimbulkan suasana kurang kondusif sebagaimana dituturkan oleh Bapak Agung yakni:

“Dengan antusias yang tinggi dari ibu-ibu PKK untuk ikut serta berjualan di Pasar Papringan namun kita mengalami keterbatasan tempat sehingga banyak yang meminta lapak untuk berjualan namun kita tunda dulu untuk dimusyawarahkan terlebih dahulu. Kita hanya memberikan dukungan berupa lapak serta aturan untuk berjualan yaitu dengan konsep Tempo Dulu atau Tradisional. Awalnya semua berjalan tertib menerapkan aturan, namun seiring berjalanya waktu ada yang melanggar konsep aturan yaitu menggunakan kemasan plastic. Masyarakat menuturkan alasan melanggar aturan karena sulitnya mencari daun dan kurang higienis..”

Wawancara tersebut diperkuat dengan hasil observasi yang didapatkan peneliti dilapangan bahwa masih terdapat stand yang menggunakan plastic sebagai kemasan produk.



Gambar 8. Pasar Papringan Sebagai Wadah Usaha Bagi Ibu-ibu PKK

Sumber : Dokumentasi Peneliti

3. Bina Lingkungan

Pada fase awal pembangunan desa wisata Jambu, pemerintah desa sudah memerhatikan akan kelestarian lingkungan sekitar. Dalam hal ini terbukti bahwa pembangunan spot wisata tidak melakukan eksploitasi lingkungan yang berlebihan. Upaya bina lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah membagikan bibit kelengkeng untuk masyarakat dengan tujuan salah satunya adalah sebagai bentuk penghijauan lingkungan. Dengan penghijauan akan tercipta perubahan fisik lingkungan desa yang semua gersang menjadi terlihat subur.

Bentuk kepedulian lingkungan juga diwujudkan pada ketersediaan tempat sampah di area spot wisata, selain itu sampah dari wisatawan dikelola dengan memilah sampah organik dan non-organik. Masyarakat diajak untuk peduli lingkungan sekitar, salah satu upaya pemerintah desa adalah mengadakan perlombaan dalam pemungutan sampah. Perlombaan pemungutan sampah dilakukan untuk menumbuhkan semangat masyarakat dalam peduli terhadap kebersihan lingkungan, sebagaimana dipaparkan oleh Bapak Agus Joko Susilo yakni :

“Kami mengadakan perlombaan untuk memungut sampah baik dari sampah plastic maupun sampah dari limbah pampers. Inovasi perlombaan seperti ini kami harap dapat mendongkrak semangat masyarakat dalam ikut serta bergabung dalam menjaga lingkungan.”.

Sampah dikumpulkan dan dikelola oleh BUMDES yang selanjutnya ditimbang sesuai yang didapatkan, berat sampah yang didapatkan akan diganti dengan sembako. Pada konsep wisata di Pasar Papingan yang mengupayakan tidak diperbolehkan menggunakan plastic sebagai kemasan produk juga memiliki tujuan yaitu untuk meminimalisir sampah plastic yang kerap kali menjadi permasalahan lingkungan. Pemeliharaan lingkungan juga dilakukan dengan membersihkan area sungai yang kerap kali dijadikan tempat mandi, cuci, kakus oleh masyarakat.



Gambar 9. Kondisi Sungai Yang Kerap Dijadikan Masyarakat Sebagai MCK

Sumber : Dokumentasi Pemerintah Desa Jambu

Melihat kondisi tersebut pihak pemerintah desa bersama pokdarwis mengajak masyarakat untuk gotong-royong membersihkan sungai yang akan dialihfungsikan sebagai spot wisata. Sebagaimana dijelaskan oleh (Lukiyanto & Wijyaningtyas, 2020) bahwa pelaksanaan gotong royong menjadi modal sosial bagi masyarakat yang sedang menjalani kegiatan sosial ekonominya. Hal tersebut diperkuat dengan hasil observasi oleh peneliti bahwa kondisi sungai yang bersih dari kegiatan MCK masyarakat dengan kualitas air yang jernih.



Gambar 10. Masyarakat Melakukan Gotong-royong Dalam Membersihkan Sungai Untuk Spot Wisata

Sumber : Dokumen Ketua Pokdarwis

Pada pengembangan bina lingkungan, masih terdapat permasalahan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat yang rendah akan pentingnya menjaga kebersihan seperti pada kajian observasi dilapangan kondisi yang terlihat masih terdapat kotoran atau sampah yang berserakan di area spot-spot wisata. Contohnya pada spot wisata Pasar Papingan, dimana terletak dibawah pohon bamboo sehingga terdapat sampah dedaunan yang selalu bertaburan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dipaparkan oleh Ibu Yanti selaku penjual di Pasar Papingan

“Kendalanya kalau disini kurang bersih ya, memang tidak bisa dipungkiri lokasinya di bawah pohon bambu jadi banyak daun yang berjatuhan namun dari pihak pegawai tidak memerhatikan itu”

Selain itu juga pada spot wisata Sejuta Ikan seperti yang dipaparkan oleh Ibu Ningsih selaku penjual di area wisata bahwa:

“kalau disini kurang kebersihan karena ya bersebelahan dengan kandang babi jadi ya sering bau”.

4. Bina Kelembagaan

Peran lembaga didalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata sangat penting. Menurut (Indriyanto, 2020) menyatakan bahwa keberhasilan dari bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan dipengaruhi oleh ketersediaan dan peran penting dari kelembagaan yang telah bersinergi secara optimal.

Kekuatan peran lembaga menjadi tolak ukur keberhasilan tujuan tercapainya pemberdayaan masyarakat desa Jambu. Berdasarkan (Syairozi, 2019) bahwa Bina kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat yang merupakan menguatkan peran peran masyarakat dalam mewujudkan program pemberdayaan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Program Inovasi Desa menumbuhkan peran masyarakat agar dapat memberikan suara dan kesempatan dalam Musyawarah

Desa untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat atau ketidakberdayaan masyarakat menjadi masyarakat yang berdaya dan mandiri.

Peran pemerintah desa Jambu selaku lembaga yang memiliki otoritas dalam mengelola sumberdaya yang ada di desa sangat mendukung dalam keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, lembaga lain yang terlibat dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat adalah Kepompok Sadar Wisata (pokdarwis), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES Jaya Makmur), RT, RW, dan PKK. Bentuk sinergitas antara lembaga-lembaga tersebut tercermin dalam mengadakan forum-forum musyawarah masyarakat Desa Jambu, dengan wadah tersebut menjadi ajang bagi lembaga untuk saling memberikan aspirasi mereka dalam mengembangkan Desa Wisata Jambu. Munculnya hubungan sinergi antar lembaga didorong dengan adanya peran pemimpin yang aktif yakni Kepala Desa dalam memberikan pendekatan kepada masing-masing lembaga.

Lembaga – lembaga memberikan pendekatan kepada masyarakat untuk bersinergi saling bahu-membahu memberikan ide-ide inovatif, memecahkan permasalahan yang ada sehingga dapat terwujudnya keberhasilan tujuan awal pembentukan desa wisata yaitu mengangkat perekonomian dan pemberdayaan. Keberhasilan pengembangan desa wisata Jambu terbukti dalam wujud dapat meraih penghargaan sebagai desa wisata terbaik berturut-turut pada tahun 2018 dan 2019.

Badan Usaha Milik Desa atau dikenal dengan singkatan BUMDES sangat berperan dalam pengembangan desa wisata Jambu. Peran BUMDES “JAYA MAKMUR” dalam pengembangan desa wisata sebagaimana dipaparkan oleh Bapak Agung Hariyono selaku ketua BUMDES bahwa :

“Jadi tugas atau peran BUMDES disini yaitu mengelola wisata, jadi unit usaha yang dimiliki BUMDES adalah pada sector wisata. Kita diberikan kebebasan dalam mengelola dana BUMDES, nah dalam BUMDES Desa Jambu ini dipergunakan untuk mengelola pariwisata baik untuk pembangunan infrastruktur penunjang seperti papan petunjuk arah, tempat sampah, meja dan kursi dalam spot wisata. Selain mengelola dana untuk infrastruktur, BUMDES juga berperan dalam mengelola dana yang berasal dari pendapatan wisata. Semua wisata di desa Jambu ini milik warga seperti Kambing Ettawa, Kebun Kelengkeng jadi peran BUMDES ini hanya selaku perantara promosi kepada wisatawan yang pendapatannya nanti akan dibagi hasil bersama warga. Dalam penyertaan modal BUMDES hanya menyertakan modal satu kali saja yaitu

pada tahun 2018 yang kemudian dikelola untuk memenuhi tahun-tahun selanjutnya.”

URAIAN		JUMLAH
A. Modal Awal Desa / BUM Desa		
A.1	Penyertaan Modal Desa Pertama 2018	Rp. 46.660.000
A.2	Penyertaan Modal Desa Kedua 2018	Rp. 13.420.000
A.3		
A.4		
A.5		
Jumlah Modal Tunai Sub Total (A)		Rp. 18.080.000

Gambar 11. Modal Awal BUMDES Pada Tahun 2018

Sumber : Dokumentasi LPJ BUMDES “JAYA MAKMUR” tahun 2019

Berdasarkan peran BUMDES yang dinyatakan oleh (Purnamasari, 2016) bahwa BUMDES berperan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal ke pasaran. Hal ini sesuai dengan peran BUMDES sebagai wadah dalam mempromosikan produk wisata yang mengusung kearifan lokal. Lembaga juga berperan dalam meningkatkan keterampilan masyarakat dengan menjalin kerjasama bersama pemerintah desa lain seperti jalinan kerjasama dengan pihak pemerintah desa Pujon Kidul Kabupaten Malang, dengan adanya bentuk kerjasama antar lembaga tersebut akan memberikan dampak baik bagi progress pengembangan wisata. Selain itu juga memberikan masukan bagi lembaga pemerintah desa jambu untuk memperbaiki kekurangan dan kemampuan menyelesaikan tantangan yang ada.

Tidak hanya antar lembaga desa, kerjasama juga terjalin dengan instansi lembaga provinsi dalam acara Jatim Fair. Pemerintah desa Jambu terpilih mendapat undangan untuk menghadiri event Jatim Fair dan mendapatkan stand untuk dapat digunakan sebagai ajang promosi desa wisata jambu serta memudahkan lembaga pemerintah desa untuk berbagi permasalahan yang dihadapi dengan instansi-instansi di tingkat Provinsi seperti Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

Lembaga pemerintah desa Jambu maupun lembaga pendukung seperti BUMDES, Pokdarwis, PKK, RT, RW, dan PKK dinilai sudah mampu dalam bersinergi untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. Namun, masih terdapat tantangan dan permasalahan yang terjadi yaitu kemampuan sumberdaya manusia yang masih rendah sehingga pengelolaan lembaga ada yang terhambat. Seperti pada lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang berperan dalam pengelolaan keuangan hasil pendapatan wisata, dimana kekurangan tenaga akuntansi dalam mengelola keuangan. Pihak pengelola keuangan kurang mumpuni dalam mengelola, hal ini dikarenakan tidak memiliki kemampuan khusus selayaknya sarjana akuntansi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi oleh peneliti mengenai Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Jambu Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri dapat disimpulkan bahwa : Pada focus penelitian Bina Manusia masyarakat sudah terbuka pola pikir untuk mendukung pengembangan desa wisata. Hal ini tak lepas dari adanya peran serta lembaga pemerintah desa yang berkoordinasi dengan kelompok sadar wisata untuk berusaha memberikan pendampingan kepada masyarakat akan pentingnya pemberdayaan untuk meningkatkan perekonomian. Pemerintah desa mendukung pengembangan wawasan dan kemampuan masyarakat dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang dihadiri narasumber dari instansi terkait seperti Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri. Pelatihan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka, selain itu pelatihan juga menjadi bekal bagi masyarakat yang memiliki kapasitas individu yang baik. Pemerintah desa membenahi karakter dan perilaku masyarakat dengan menggalakan Sapta Pesona wisata sebagai acuan dalam menempatkan dirinya sebagai pelayan wisata. Namun masih terdapat kendala pada pengembangan masyarakat, yakni masih terdapat masyarakat yang memiliki karakter acuh tak acuh dalam mengikuti pelatihan sehingga wawasan dan pengetahuan yang didapatkan dalam pelatihan tidak diimplementasikan pada usaha yang dimiliki.

Pada Bina Usaha, pemerintah desa sangat mendukung dengan adanya usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Peran BUMDES sebagai wadah atau jembatan bagi promosi usaha masyarakat untuk dijual kepada wisatawan melalui spot wisata. Masyarakat diberikan fasilitas lapak untuk berjualan di area spot wisata seperti Pasar Papingan dipergunakan untuk menjadi wadah usaha bagi perkumpulan ibu-ibu PKK dalam mengisi waktu luang. Dengan adanya wadah berjualan bagi masyarakat di spot wisata sehingga akan membantu usaha masyarakat dalam mempromosikan usaha, sekaligus produk usaha yang dimiliki masyarakat dapat dijadikan sebagai produk oleh-oleh khas desa Jambu untuk wisatawan. Namun dalam pengembangannya masih terdapat kendala yakni masih terdapat masyarakat yang kurang tertib akan aturan yang dibuat di spot wisata tertentu seperti Pasar Papingan yang mengusung tema Tempo Doeloe, dimana konsep berjualan tidak diperkenankan menggunakan media modern seperti plastic namun masyarakat merasa hal tersebut menjadi kendala dalam kemasan produk sehingga produk dikemas menggunakan plastic.

Pada Bina Lingkungan, pemerintah desa bersinergi dengan Pokdarwis memberikan himbauan kepada

masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini dilakukan dengan mengadakan lomba mengumpulkan sampah, dengan tujuan untuk menarik minat masyarakat dalam menjaga lingkungan. Sampah yang dikumpulkan dikelola oleh BUMDES yang selanjutnya berat sampah akan ditimbang dan diberikan imbalan berupa sembako. Upaya menjaga kebersihan yang lain juga dilakukan dalam mengajak masyarakat dalam gotong-royong membersihkan DAS dan parit untuk dijadikan sebagai spot wisata Sejuta Ikan. Namun, dalam upaya yang telah dilakukan masih terdapat hambatan yakni seperti rencana pembangunan Bank Sampah Desa yang dipergunakan sebagai wadah masyarakat menampung sampah dan menarik minat mereka dengan memberikan imbalan sembako. Namun perencanaan tersebut terhambat akan pendanaan yang kurang sehingga belum dapat direalisasikan.

Bina Lembaga, Lembaga desa baik pemerintah desa Jambu, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), PKK, RT,RW memiliki peran yang krusial dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat. Lembaga memiliki peran dalam pendampingan masyarakat untuk membantu meningkatkan keikutsertaan mereka dalam mengembangkan desa wisata. Selain itu, lembaga juga berperan dalam menjalin kerjasama dengan lembaga internal desa untuk berbagi strategi pengembangan desa wisata. Selain itu juga menjalin kerjasama dengan berbagai instansi untuk mengadakan pelatihan dalam membangun kapasitas usaha masyarakat. Namun terdapat permasalahan yakni tenaga ahli yang kurang mumpuni dalam mengelola lembaga sehingga pengelolaan tidak dilakukan secara baik.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang dipaparkan penulis diatas, maka penulis dapat memberikan saran antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemerintah desa bersama Kelompok Sadar Wisata sebaiknya lebih memerhatikan masyarakat yang kurang menghargai dengan pelaksanaan pelatihan, hal ini dilakukan agar masyarakat yang masih memiliki karakter acuh-tak acuh akan lebih menghargai adanya pelatihan sehingga dapat diimplementasikan pada usaha mereka
- 2) Konsep wisata Pasar Papingan dalam aturan dilarang menggunakan plastik sebaiknya dilakukan dengan kondisional mengingat tidak semua produk makanan atau minuman dapat dikemas dengan dedaunan.
- 3) Pokdarwis menggalakan piket kebersihan kepada masyarakat yang bekerja mengelola spot wisata untuk menjaga kebersihan sehingga masyarakat akan merasa nyaman saat berkunjung.

- 4) Pengelolaan keuangan BUMDES dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Keuangan, sehingga akan menghasilkan pengelolaan yang transparan dan akuntabel
- 5) Pemerintah sebaiknya mengadakan forum musyawarah bersama masyarakat dalam mengatasi tantangan atau permasalahan yang ada sehingga ada andil masyarakat didalamnya untuk memberikan aspirasi dan masukan.
- 6) Pembangunan Bank Sampah dilakukan dengan lahan sederhana sehingga tidak begitu memerlukan banyak biaya untuk mewujudkan
- 7) Keberlanjutan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata setelah adanya pergantian Kepala Desa kedepannya harus tetap dijalankan sesuai dengan tujuan awal yaitu untuk mewujudkan masyarakat Desa Jambu yang mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, & Meirinawati. (2020). Moh. Abdul Azis. *Jurnal mahasiswa unesa*, 1–10.
- BPS. (2018). *Statistik Potensi Desa Indonesia 2018*. CV. Dharmaputra.
- Edwin, G. (2015). Studi Tentang Pembentukan Desa Setulang Sebagai Desa Wisata di Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau. *Jurnal Pemerintah Integratif*, 3(1), 152–163.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143.
- Gunawan, I. (2016). KUALITATIF Imam Gunawan. *Jurnal Pendidikan*, 27.
- Imron, M. (2020). Kolaborasi Quadruple Helix Dalam Menciptakan Inovasi Konsep Wisata Edukasi Kampung Nanas Di Desa Palaan. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(2), 68.
- Indriyanto, W. R. (2020). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM DESA PERCONTOHAN (STUDI PADA DESA DUDUKSAMPEYAN KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN KABUPATEN GRESIK) Mukharromah Rahayu Indriyanto Abstrak. *Jurnal mahasiswa. Unesa.*, 1–8.
- Kanom, Darmawan, & Nurhalimah. (2020). Sosialisasi Penerapan Sapta Pesona Dalam Perencanaan Dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Di Lider Desa Sumberarum Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi. *Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 24.
- Karimah, F. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 2(4), 597–602.
- Lukiyanto, & Wijyaningtyas, M. (2020). Gotong Royong as social capital to overcome micro and small enterprises' capital difficulties. *Heliyon*, 6(9), 1–8.
- Nurhuda, R. (2013). Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(4), 110–119.
- Nursetiawan, I. (2018). Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 72–81.
- Purnamasari, F. M. (2016). (STUDI BUMDes MAWAR DESA KEPEL , KECAMATAN NGETOS , KABUPATEN NGANJUK) Syndi Dwi Purnamasari. *Jurnal mahasiswa unesa*, 1–12.
- Rindayani, M. F. M. (2013). COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH THE PEOPLE SALT ENTERPRISES EMPOWERMENT PROGRAM (PUGAR) ON THE DEPARTMENT OF MARINE AND FISHERIES AT PAMEKASAN REGENCY. *Jurnal Mahasiswa Unesa*, 1–15.
- Shonah, F. M. (2013). Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Mandiri Berbasis Komunitas. *Jurnal Mahasiswa Unesa*, 1(2), 15.
- Syairozi. (2019). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI PENGGUNA KOSMETIK ALAMI BERIBU KHASIAT HASIL PRODUK TANI UNTUK MEMINIMALKAN PENGELUARAN MASYARAKAT DESA WONOREJO KECAMATAN GLAGAH KAB.LAMONGAN. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3, 53–57.
- Tukiman, Ertien, A. (2019). DOMPYONG KECAMATAN BENDUNGAN KABUPATEN TRENGGALEK Tukiman Prodi Ilmu Administrasi Negara , Universitas UPN “ Veteran ” Jawa Timur , Ertien Rining N Prodi Ilmu Administrasi Negara , Universitas UPN “ Veteran ” Jawa Timur Andre Yusuf Trisna Prodi Teknologi. *Journal of Public Sector Innovations*, 4(1), 38–45.
- Vitasurya, V. R. (2016). Local Wisdom for Sustainable Development of Rural Tourism, Case on Kalibiru and Lopati Village, Province of Daerah Istimewa Yogyakarta. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 216, 97–108.